PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Republika Hari: Selasa Tanggal: 15 Maret 2011 Halaman: 22

LPSE Semakin Diminati

Pengadaan melalui LPSE untuk menegakkan transparansi.

YOGYAKARTA — Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) milik Pemerintah Kota Yogyakarta semakin diminati. Saat ini, sudah ada 12 institusi di luar Pemerintah Kota Yogyakarta yang telah melakukan penandatanganan kesepahaman bersama dengan unit pelayanan ini.

"Sejak dibuka pada 2009, sudah ada 12 institusi di luar Pemerintah Kota Yogyakarta yang melakukan kerja sama pengadaan barang dan jasa melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) milik Pemkot Yogyakarta," kata Kepala Bagian Pengandalian dan Pembangunan Kota Yogyakarta, Edi Muhammad di Yogyakarta, Senin (14/3).

Tiga institusi baru di luar Pemerintah Kota Yogyakarta yang melakukan penandatanganan kesepahaman bersama dengan LPSE adalah Institut Seni Indonesia (ISI), Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) Yogyakarta, dan Gedung Agung. Menurut dia, dengan semakin banyaknya instansi di luar pemerintah yang melakukan perjanjian kerja sama, maka akan membuka kesempatan yang lebih luas bagi penyedia barang dan jasa di Kota Yogyakarta untuk mengikuti lelang tersebut.

"Mereka tidak hanya dapat mengikuti pengadaan barang dan jasa dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemerintah Kota Yogyakarta, tetapi juga instansi luar. Ini saling menguntungkan," katanya seperti dikutip *Antara*.

Pelaksanaan lelang secara elektronik tersebut, lanjut Edi, adalah komitmen untuk menjalankan peraturan pemerintah yaitu per 1 Januari 2011 seluruh instansi pemerintah di seluruh Indonesia harus melakukan pengadaan secara elektronik. "LPSE milik Pemerintah Kota Yogyakarta dinilai bisa menjadi percontohan yang baik, salah satunya memiliki data penyedia barang dan jasa," katanya.

Sementara Kepala Bagian Tata Usaha Batan Yogyakarta, Isman Mulyadi mengatakan, penandatangan kesepahaman bersama dengan Pemkot Yogyakarta tersebut murni dilakukan untuk pengadaan barang dan jasa dan sudah menjadi regulasi yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Biasanya, kata dia, pihaknya melakukan pengadaan barang dan jasa dari luar negeri.

Pada kesepakatan awal, Batan akan melakukan pengadaan barang dan jasa senilai lebih dari Rp 1 miliar dengan LPSE Kota Yogyakarta, seperti tenaga pengamanan dan sejumlah peralatan. "Kami akan segera menayangkan paket pekerjaan apa saja yang akan dilakukan dan kemudian bisa diakses oleh penyedia barang dan jasa," katanya.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Yogyakarta melakukan penandatanganan kerja sama dengan pemerintah kota setempat untuk memanfaatkan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik milik pemerintah daerah tersebut. Penandatanganan kerja sama pemanfaatan layanan pengadaan barang secara elektronik (LPSE) tersebut dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta Sukardi dengan Wali Kota Yogyakarta Herry Zudianto. "Kami akan memanfaatkan layanan pengadaan secara elektronik ini untuk pelelangan pangadaan genset dan kursi pertemuan," kata Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta Sukardi di Yogyakarta, beberapa waktu lalu.

Menurut dia, proses pengadaan barang dan jasa melalui layanan pengadaan secara elektronik milik Pemerintah Kota Yogyakarta tersebut dilakukan dalam rangka transparansi penggunaan anggaran negara. Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pengadaan barang dan jasa berupa genset dan kursi pertemuan tersebut akan menghabiskan dana sebesar Rp 375 juta.

Sukardi mengatakan, dana yang dimiliki kejaksaan untuk pengadaan barang dan jasa tidak terlalu banyak. Namun anggaran negara tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan secara moral, yuridis dan juga administratif. "Bagaimanapun juga, dana yang digunakan tersebut adalah uang negara, yang berarti uang rakyat sehingga penggunaannya harus transparan disertai pertanggungjawaban yang jelas," katanya. ■ **ed:** heri purwata

Herman Edy Sulistio, SI

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Pengendalian Pembanguna	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005